



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2015, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrua (*Cash Toward Accrual*), maka mulai tahun 2015 dan seterusnya, semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrua adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrua, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat menyediakan informasi tentang:

- a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual Pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



- r. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021 tanggal 1 September 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- t. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- v. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Memuat penjelasan mengenai pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis akrual serta rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut:

1. Penjelasan atas Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi



dari Basis Kas Menuju Akrua (*Cash Toward Accrual Basis*) ke Basis Akrua (*Accrual Basis*) pada Laporan Keuangan Tahun 2014.

2. Laporan Realisasi Anggaran
  - a. Pendapatan – LRA
  - b. Belanja
3. Neraca
  - a. Aset
  - b. Kewajiban
  - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional
  - a. Pendapatan – LO
  - b. Beban
  - c. Kegiatan Non Operasional
  - d. Pos Luar Biasa
5. Laporan Perubahan Ekuitas

#### **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Memuat penjelasan mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.

#### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum, pengelolaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan capaian kinerja 100%, sedangkan kegiatan lainnya mencapai di bawah 100%.

Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tidak mempunyai Pendapatan. Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457,00 atau sebesar 53,01% dari anggaran sebesar Rp. 8.323.336.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.911.531.543,00. Realisasi tersebut terdiri dari

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 4.411.804.457,00 atau sebesar 53,01% dari anggaran sebesar Rp. Rp. 8.323.336.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
  - Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.709.486.152,00 atau sebesar 96,11% dari anggaran sebesar Rp. 2.819.040.000,00
  - Realisasi Barang dan Jasa sebesar 1.702.318.305,00 atau sebesar 30,93% dari anggaran sebesar Rp. 5.504.296.000,00

Dari data tersebut terdapat surplus / defisit anggaran Tahun 2023 sebesar ( Rp. 4.411.804.457,00)

Adapun rinciannya dapat dilihat pada table di bawah ini :

URAIAN	2023			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>BELANJA</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>3,911,531,543.00</b>	<b>53.01</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>3,911,531,543.00</b>	<b>53.01</b>
Belanja Pegawai	2,819,040,000.00	2,709,486,152.00	109,553,848.00	96.11
Belanja Barang dan Jasa	5,504,296,000.00	1,702,318,305.00	3,801,977,695.00	30.93
Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(8,323,336,000.00)</b>	<b>(4,411,804,457.00)</b>	<b>(3,911,531,543.00)</b>	<b>53.01</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(8,323,336,000.00)</b>	<b>(4,411,804,457.00)</b>	<b>(3,911,531,543.00)</b>	<b>53.01</b>

#### 2.1.1 Alokasi APBD Kabupaten Purbalingga



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Alokasi APBD Kabupaten Purbalingga yang dikelola Dinpermasdes Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 5 Program , 10 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>8,323,336,000</b>	<b>4,411,804,457</b>	<b>3,911,531,543</b>	<b>53.01</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3,415,754,000</b>	<b>3,286,188,958</b>	<b>129,565,042</b>	<b>96.21</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4,568,000</b>	<b>4,560,500</b>	<b>7,500</b>	<b>99.84</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,493,000	2,487,400	5,600	99.78
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,075,000	2,073,100	1,900	99.91
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,927,519,000</b>	<b>2,818,104,023</b>	<b>109,414,977</b>	<b>96.26</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,783,390,000	2,676,386,152	107,003,848	96.16
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110,610,000	110,354,271	255,729	99.77
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33,519,000	31,363,600	2,155,400	93.57
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2,283,000</b>	<b>1,883,000</b>	<b>400,000</b>	<b>82.48</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,283,000	1,883,000	400,000	82.48
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>50,988,000</b>	<b>42,593,800</b>	<b>8,394,200</b>	<b>83.54</b>
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	1,502,000	1,385,000	117,000	92.21
Penyediaan bahan logistik kantor	27,700,000	25,428,800	2,271,200	91.80
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	996,000	960,000	36,000	96.39
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,150,000	4,015,000	4,135,000	49.26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,150,000	8,405,000	1,745,000	82.81
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	2,490,000	2,400,000	90,000	96.39
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>234,574,000</b>	<b>223,827,835</b>	<b>10,746,165</b>	<b>95.42</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	558,000	-	558,000	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,440,000	44,417,398	5,022,602	89.84
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	4,826,000	4,826,000	-	100.00
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	179,750,000	174,584,437	5,165,563	97.13
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>195,822,000</b>	<b>195,219,800</b>	<b>602,200</b>	<b>99.69</b>
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178,563,000	177,993,800	569,200	99.68
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,053,000	6,020,000	33,000	99.45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,206,000	11,206,000	-	100.00
<b>Program Penataan Desa</b>	<b>19,505,000</b>	<b>19,351,200</b>	<b>153,800</b>	<b>99.21</b>
<b>Penyelenggaraan penataan Desa</b>	<b>19,505,000</b>	<b>19,351,200</b>	<b>153,800</b>	<b>99.21</b>
Fasilitasi Tata wilayah Desa	2,490,000	2,489,000	1,000	99.96
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	2,490,000	2,489,200	800	99.97
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	14,525,000	14,373,000	152,000	98.95
<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>69,515,000</b>	<b>69,227,800</b>	<b>287,200</b>	<b>99.59</b>
<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>69,515,000</b>	<b>69,227,800</b>	<b>287,200</b>	<b>99.59</b>
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota	7,677,000	7,442,700	234,300	96.95
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	61,838,000	61,785,100	52,900	99.91
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>516,530,000</b>	<b>453,820,809</b>	<b>62,709,191</b>	<b>87.86</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>516,530,000</b>	<b>453,820,809</b>	<b>62,709,191</b>	<b>87.86</b>



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	82,375,000	44,988,550	37,386,450	54.61
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3,776,000	2,374,500	1,401,500	62.88
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	9,390,000	6,473,000	2,917,000	68.94
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	204,658,000	203,883,189	774,811	99.62
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	138,286,000	137,531,240	754,760	99.45
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa	3,398,000	977,600	2,420,400	28.77
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	17,577,000	13,462,430	4,114,570	76.59
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa	8,300,000	4,918,900	3,381,100	59.26
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2,150,000	1,748,400	401,600	81.32
fasilitasi Penyusunan Profil desa	7,944,000	4,822,300	3,121,700	60.70
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10,375,000	7,119,400	3,255,600	68.62
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	4,150,000	1,623,400	2,526,600	39.12
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	4,875,000	4,867,600	7,400	99.85
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	19,276,000	19,030,300	245,700	98.73
<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>4,302,032,000</b>	<b>583,215,690</b>	<b>3,718,816,310</b>	<b>13.56</b>
<b>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4,302,032,000</b>	<b>583,215,690</b>	<b>3,718,816,310</b>	<b>13.56</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	3,761,152,000	63,180,100	3,697,971,900	1.68
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	20,751,000	18,190,600	2,560,400	87.66
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	8,550,000	3,153,200	5,396,800	36.88
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	17,226,000	13,878,000	3,348,000	80.56
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	148,322,000	140,386,790	7,935,210	94.65
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	346,031,000	344,427,000	1,604,000	99.54
<b>TOTAL</b>	<b>8,323,336,000</b>	<b>4,411,804,457</b>	<b>3,911,531,543</b>	<b>53.01</b>

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- A.** Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Realisasi Anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota sebesar Rp. 3.286.188.958,00 atau sebesar 96,21% dari anggaran sebesar Rp. 3.415.754.000,00.
- Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 

Terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah





- Realisasi anggaran sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp. 2.487.400,00 atau sebesar Rp. 99,78% dari anggaran sebesar Rp. 2.493.000,00.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Realisasi anggaran sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp. 2.073.100,00 atau sebesar Rp. 99,91% dari jumlah anggaran Rp. 2.075.000,00.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Terdiri dari 3 sub kegiatan , yaitu
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Realisasi anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.676.386.152,00 atau sebesar 96,26% dari anggaran sebesar Rp. 2.783.390.000,00.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Realisasi anggaran sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 110.354.271,00 atau sebesar Rp. 99,77% dari Rp. 110.610.000,00.
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  
Realisasi anggaran sub kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 31.363.600,00 atau sebesar 93,57% dari anggaran Rp. 33.519.000,00.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  
Realisasi anggaran sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah sebesar Rp. 1.883.000,00 atau 82,48% dari anggaran sebesar Rp. 2.283.000,00.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
Realisasi anggaran sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yaitu sebesar Rp. 1.385.000,00 atau 92,21% dari anggaran Rp. 1.502.000,00.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Realisasi anggaran sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor sebesar Rp. 25.428.800,00 atau sebesar Rp. 27.700.000,00



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan yaitu sebesar Rp. 960.000,00 atau 96,39% dari anggaran sebesar Rp.996.000,00.
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu sebesar Rp. 4.015.000,00 atau 49,26% dari anggaran sebesar Rp. 8.150.000,00.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah sebesar Rp. 8.405.000,00 atau 82,81% dari anggaran sebesar Rp. 10.150.000,00.
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD sebesar Rp 2.400.000,00 atau 96,39% dari anggaran sebesar Rp. 2.490.000,00.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Terdiri dari 4 sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Tidak terdapat Realisasi anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat atau sebesar Rp. 0,00.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 44.417.398,00 atau sebesar Rp. 89,84% dari anggaran sebesar Rp. 49.440.000,00.
  - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor sebesar Rp. 4.826.000,00 atau sebesar Rp. 100% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 4.826.000,00.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 174.584.437,00 atau sebesar Rp. 97,13% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 179.750.000,00.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan



#### Daerah

- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 177,993.800,00 atau 99,68% dari total anggaran sebesar Rp. 178.563.000,00.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 6.020.000,00 atau 99,45% dari total anggaran sebesar Rp. 6.053.000,00.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 11.206.000,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp. 11.206.000,00.

#### A. Program Penataan Desa

Realisasi Program Penataan Desa sebesar Rp. 19.351.200,00 atau sebesar Rp. 99,21% dari anggaran total Rp. 19.505.000,00. Program Penataan Desa terdiri dari 1 ( satu ) kegiatan yang dibagi dalam 3 sub kegiatan yaitu :

##### 1. Penyelenggaraan penataan Desa

- Fasilitasi Tata wilayah Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Tata wilayah Desa sebesar Rp. 2.489.000,00 atau 99,96% dari total anggaran sebesar Rp. 2.490.000,00.
- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa sebesar Rp. 2.489.200,00 atau 99,97% dari total anggaran sebesar Rp. 2.490.000,00.
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa sebesar Rp. 14.373.000,00 atau 98,95% dari total anggaran sebesar Rp. 14.525.000,00.

#### B. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Realisasi Program Peningkatan Kerja Sama Desa sebesar Rp. 69.227.800 atau sebesar Rp. 99,59% dari anggaran total Rp. 69.515.000,00. Program



Peningkatan Kerja Sama Desa terdiri dari 1 ( satu ) kegiatan yang dibagi dalam 2 sub kegiatan yaitu :

**1. Fasilitas Kerja Sama antar Desa**

- Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota sebesar Rp. 7.442.700,00 atau 96,95% dari total anggaran sebesar Rp. 7.677.000,00
- Fasilitas Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota sebesar Rp. 61.785.100,00 atau 96,95% dari total anggaran sebesar Rp. 61.838.000,00.

**C. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 453.820.809,00 atau sebesar Rp. 87,86% dari anggaran total Rp. 516.530.000,00. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 ( satu ) kegiatan yang dibagi dalam 14 sub kegiatan yaitu :

**1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

- Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 44.988.550,00 atau 54,61% dari total anggaran sebesar Rp. 82.375.000,00.
- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa sebesar Rp. 2.374.500,00 atau 62,88% dari total anggaran sebesar Rp. 3.776.000,00.
- Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 6.473.000,00 atau 68,94% dari total anggaran sebesar Rp. 9.390.000,00.
- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 203.883.189,00 atau 99,62% dari total anggaran sebesar Rp. 204.658.000,00.



- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp. 137.531.240 atau 99,45% dari total anggaran sebesar Rp. 138.286.000,00.
- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa sebesar Rp. 977.600 atau % dari total anggaran sebesar Rp. 3.398.000,00.
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa sebesar Rp. 13.462.430 atau 76,59 % dari total anggaran sebesar Rp. 17.577.000,00.
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa sebesar Rp. 4.918.900,00 atau 59,26% dari total anggaran sebesar Rp. 8.300.000,00.
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebesar Rp. 1.748.400,00 atau 59,26% dari total anggaran sebesar Rp. 2.150.000,00.
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa sebesar Rp. 4.822.300,00 atau 60,70 % dari total anggaran sebesar Rp. 7.944.000,00.
- Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa sebesar Rp. 7.119.400,00 atau 68,62% dari total anggaran sebesar Rp. 10.375.000,00.
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebesar Rp. 1.623.400,00 atau 39,12 % dari total anggaran sebesar Rp. 4.150.000,00.



- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD  
Realisasi anggaran sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD sebesar Rp. 4.867.600 atau 99,85 % dari total anggaran sebesar Rp. 4.875.000,00
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 19.030.300,00 atau 98,73% dari total anggaran sebesar Rp. 19.276.000,00.

**D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp. 583.215.690,00 atau sebesar Rp. 13,56% dari anggaran total Rp. 4.302.032.000,00.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 ( satu ) kegiatan yang dibagi dalam 6 sub kegiatan yaitu :

1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.  
Realisasi anggaran sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp.63.180.100,00 atau 1,68 % dari total anggaran sebesar Rp. 3.761.152 .000,00.
  - Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan



Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 18.190.000,00 atau 87,66 % dari total anggaran sebesar Rp. 20.751.000,00.

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 3.153.200,00 atau % dari total anggaran sebesar Rp. 8.550.000,00.
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebesar Rp. 13.878.000,00 atau 80,56% dari total anggaran sebesar Rp. 17.226.000,00.
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebesar Rp. 140.386.790,00 atau 94,65 % dari total anggaran sebesar Rp. 148.322.000,00.
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp.344.427.000 atau 99,54% dari total anggaran sebesar Rp. 346.031.000,00.

#### 2.1.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mempunyai Realisasi Pendapatan baik pada Tahun 2022 maupun 2023.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022, realisasi anggaran Tahun 2023 Rp. 4.411.804.457,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 724.214.610,00 atau turun sebesar 14,10% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 5.136.019.067,00, yang terdiri dari :

- Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 714.214.610,00 atau ( 13,93%) dari realisasi belanja operasi Tahun 2022 sebesar Rp. 5.126.019.067,00, dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.709.486.152,00, turun sebesar Rp.



261.308.504,00 atau (8,80%) dari realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 2.970.794.656,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.935.224.411,00 , juga mengalami penurunan sebesar 232.906.106,00 atau ( 12,04%) dari Tahun 2022 sebesar Rp. 1.935.224.411,00. Pada Tahun 2023 tidak terdapat anggaran belanja hibah, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 220.000.000,00 atau (100%) dari realisasi belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp. 220.000.000,00.

- Pada Tahun 2023 tidak terdapat realisasi belanja modal. Sehingga realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 10.000.000 ,00 atau ( 100%) dari realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00.

Sehingga pada Tahun 2023 mengalami penurunan defisit sebesar Rp. 724.214.610,00 dibandingkan pada Tahun 2022.

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	2023		2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BELANJA</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>5,136,019,067.00</b>	<b>(724,214,610.00)</b>	<b>(14.10)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>5,126,019,067.00</b>	<b>(714,214,610.00)</b>	<b>(13.93)</b>
Belanja Pegawai	2,819,040,000.00	2,709,486,152.00	2,970,794,656.00	(261,308,504.00)	(8.80)
Belanja Barang dan Jasa	5,504,296,000.00	1,702,318,305.00	1,935,224,411.00	(232,906,106.00)	(12.04)
Belanja Hibah	0.00	0.00	220,000,000.00	(220,000,000.00)	(100.00)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>(10,000,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(100.00)
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(8,323,336,000.00)</b>	<b>(4,411,804,457.00)</b>	<b>(5,136,019,067.00)</b>	<b>724,214,610.00</b>	<b>(14.10)</b>
<b>SILPA</b>	<b>(8,323,336,000.00)</b>	<b>(4,411,804,457.00)</b>	<b>(5,136,019,067.00)</b>	<b>724,214,610.00</b>	<b>(14.10)</b>

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Tahun anggaran 2023 secara umum dapat berjalan dengan lancar, namun demikian memang masih terdapat beberapa sub kegiatan yang penyerapan anggaran tidak bisa maksimal baik itu karena faktor teknis maupun non teknis, diantaranya :

- a. Adanya keterbatasan personil Dinpermasdes, dimana satu personil merangkap tugas sebagai pelaksana administrasi sekaligus sebagai petugas teknis maupun petugas lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.





- b. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan di desa belum semuanya tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan di tingkat Kabupaten.
- c. Adanya Kendala terkait dasar hukum dalam pencairan pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



### **BAB III**

#### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **3.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

##### **3.1.1 Penjelasan Umum Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Realisasi Belanja tahun 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457,00 atau 53,01% dari pagu sebesar Rp. 8.323.336.000,00. Realisasi Belanja Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 724.214.610,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 5.136.019.067,00. Penurunan tersebut berasal dari Penurunan belanja operasi sebesar Rp. 714.214.610,00 atau (13,93%) dari realisasi belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457,00 dan berasal dari penurunan realisasi belanja modal sebesar Rp. 10.000.000,00 atau (100%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Uraian	2023		2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BELANJA</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>5,136,019,067.00</b>	<b>(724,214,610.00)</b>	<b>(14.10)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>5,126,019,067.00</b>	<b>(714,214,610.00)</b>	<b>(13.93)</b>
Belanja Pegawai	2,819,040,000.00	2,709,486,152.00	2,970,794,656.00	(261,308,504.00)	(8.80)
Belanja Barang dan Jasa	5,504,296,000.00	1,702,318,305.00	1,935,224,411.00	(232,906,106.00)	(12.04)
Belanja Hibah	0.00	0.00	220,000,000.00	(220,000,000.00)	(100.00)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>(10,000,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(100.00)
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(8,323,336,000.00)</b>	<b>(4,411,804,457.00)</b>	<b>(5,136,019,067.00)</b>	<b>724,214,610.00</b>	<b>(14.10)</b>
<b>SILPA</b>	<b>(8,323,336,000.00)</b>	<b>(4,411,804,457.00)</b>	<b>(5,136,019,067.00)</b>	<b>724,214,610.00</b>	<b>(14.10)</b>

Adapun Perkembangan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Tahun 2019 sd Tahun 2023 adalah sebagai berikut :





Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

714.214.610,00 atau (13,93%) , sedangkan Belanja Modal turun sebesar Rp 10.000.000,00 atau (100,00%) sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah:

BELANJA					
Uraian	2023		2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BELANJA OPERASI	8,323,336,000.00	4,411,804,457.00	5,126,019,067.00	(714,214,610.00)	(13.93)
BELANJA MODAL	0.00	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>5,136,019,067.00</b>	<b>(724,214,610.00)</b>	<b>(14.10)</b>

**1. Belanja Operasi \_\_\_\_\_ Rp. 4.411.804.457,00**

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.4.411.804.457,00 atau 53,01% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp.8.323.336.000,00.

Belanja Operasi tersebut merupakan 53,01% dari total Realisasi Belanja Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.714.214.610,00) atau (13,93%). Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan Belanja Pegawai dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 2.709.486.152,00 turun Rp. 261.308.504,00 atau (8,80%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp.2.970.794.656,00.

Di samping itu ada penurunan Belanja Barang pada tahun 2023 dengan realisasi Rp. 1.702.318.305,00 turun Rp.232.906.106,00 atau (12,04%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp.1.935.224.411,00.

Sedangkan untuk realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan Rp. 220.000.000,00 atau (100%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 220.000.000,00, karena pada tahun 2023 tidak ada Belanja Hibah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:

Uraian	2023		2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>5,126,019,067.00</b>	<b>(714,214,610.00)</b>	<b>(13.93)</b>
Belanja Pegawai	2,819,040,000.00	2,709,486,152.00	2,970,794,656.00	(261,308,504.00)	(8.80)
Belanja Barang dan Jasa	5,504,296,000.00	1,702,318,305.00	1,935,224,411.00	(232,906,106.00)	(12.04)
Belanja Hibah	0.00	0.00	220,000,000.00	(220,000,000.00)	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>8,323,336,000.00</b>	<b>4,411,804,457.00</b>	<b>5,126,019,067.00</b>	<b>(714,214,610.00)</b>	<b>(13.93)</b>



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

**a. Belanja Pegawai \_\_\_\_\_ Rp. 2.709.486.152,00**

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.709.486.152,00 atau 96,11% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2023 sebesar Rp.2.819.040.000,00. Realisasi Belanja Pegawai tersebut merupakan 61,41% dari total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 261.308.504,00 atau (8,80%) dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp.2.970.794.656,00. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai pensiun dan mutasi keluar antar SKPD, sehingga mempengaruhi realisasi belanja pegawai.

Rincian Belanja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Belanja Pegawai**

Uraian	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6 =(3-5)	7 = 6/5*100
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,657,259,000.00	1,584,601,154.00	95.62	1,744,875,655.00	(160,274,501.00)	(9.19)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,126,131,000.00	1,091,784,998.00	96.95	1,154,244,001.00	(62,459,003.00)	(5.41)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35,650,000.00	33,100,000.00	92.85	71,675,000.00	(38,575,000.00)	(53.82)
<b>Jumlah</b>	<b>2,819,040,000.00</b>	<b>2,709,486,152.00</b>	<b>96.11</b>	<b>2,970,794,656.00</b>	<b>(261,308,504.00)</b>	<b>(8.80)</b>

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Uraian	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6 =(3-5)	7 = 6/5*100
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1,657,259,000.00</b>	<b>1,584,601,154.00</b>	<b>95.62</b>	<b>1,744,875,655.00</b>	<b>(160,274,501.00)</b>	<b>(9.19)</b>
Belanja Gaji Pokok ASN	1,202,837,000.00	1,156,972,200.00	96.19	1,280,956,800.00	(123,984,600.00)	(9.68)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	101,074,000.00	101,257,202.00	100.18	105,651,398.00	(4,394,196.00)	(4.16)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	138,810,000.00	128,450,000.00	92.54	145,130,000.00	(16,680,000.00)	(11.49)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28,281,000.00	28,325,000.00	100.16	30,145,000.00	(1,820,000.00)	(6.04)
Belanja Tunjangan Beras ASN	59,014,000.00	59,456,820.00	100.75	63,150,240.00	(3,693,420.00)	(5.85)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16,027,000.00	15,379,243.00	95.96	16,172,407.00	(793,164.00)	(4.90)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	17,000.00	15,851.00	93.24	16,048.00	(197.00)	(1.23)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	94,800,000.00	85,292,516.00	89.97	93,130,585.00	(7,838,069.00)	(8.42)



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,466,000.00	2,363,079.00	95.83	2,630,790.00	(267,711.00)	(10.18)
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7,396,000.00	7,089,243.00	95.85	7,892,387.00	(803,144.00)	(10.18)
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>1,126,131,000.00</b>	<b>1,091,784,998.00</b>	<b>96.95</b>	<b>1,154,244,001.00</b>	<b>(62,459,003.00)</b>	<b>-5.41</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,126,131,000.00	1,091,784,998.00	96.95	1,154,244,001.00	(62,459,003.00)	(5.41)
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>35,650,000.00</b>	<b>33,100,000.00</b>	<b>92.85</b>	<b>71,675,000.00</b>	<b>(38,575,000.00)</b>	<b>-53.82</b>
<b>Belanja Honorarium</b>	<b>33,850,000.00</b>	<b>31,300,000.00</b>	<b>92.47</b>	<b>66,675,000.00</b>	<b>(35,375,000.00)</b>	<b>(53.06)</b>
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	33,450,000.00	31,300,000.00	93.57	66,675,000.00	(35,375,000.00)	-53.06
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∞
<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>(3,200,000.00)</b>	<b>(64.00)</b>
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	5,000,000.00	(3,200,000.00)	(64.00)
<b>Jumlah</b>	<b>2,819,040,000.00</b>	<b>2,709,486,152.00</b>	<b>96.11</b>	<b>2,970,794,656.00</b>	<b>(261,308,504.00)</b>	<b>(8.80)</b>

**b. Belanja Barang dan Jasa Rp 1.702.318.305,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp.1.702.318.305,00 atau 30,93% dari anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2023 sebesar Rp.5.504.296.000,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut merupakan 38,58% dari total realisasi Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 232.906.106,00 atau (12,04%) dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.935.224.411,00.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebagai berikut

:

Belanja Barang dan Jasa						
Uraian	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6 =(3-5)	7 = 6/5*100
Belanja Barang	740,717,000.00	684,547,980.00	92.42	823,194,690.00	(138,646,710.00)	(16.84)
Belanja Jasa	4,163,651,000.00	439,762,235.00	10.56	372,863,024.00	66,899,211.00	17.94
Belanja Pemeliharaan	90,947,000.00	90,384,500.00	99.38	70,826,000.00	19,558,500.00	27.61
Belanja Perjalanan Dinas	488,231,000.00	466,873,590.00	95.63	554,840,697.00	(87,967,107.00)	(15.85)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20,750,000.00	20,750,000.00	100.00	113,500,000.00	(92,750,000.00)	(81.72)
<b>Jumlah</b>	<b>5,504,296,000.00</b>	<b>1,702,318,305.00</b>	<b>30.93</b>	<b>1,935,224,411.00</b>	<b>(232,906,106.00)</b>	<b>(12.04)</b>



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Adapun rinciannya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Uraian	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6 =(3-5)	7 = 6/5*100
<b>Belanja Barang</b>	<b>740,717,000.00</b>	<b>684,547,980.00</b>	<b>92.42</b>	<b>823,194,690.00</b>	<b>(138,646,710.00)</b>	<b>(16.84)</b>
Belanja Barang Pakai Habis	740,717,000.00	684,547,980.00	92.42	823,194,690.00	(138,646,710.00)	(16.84)
<b>Belanja Jasa</b>	<b>4,163,651,000.00</b>	<b>439,762,235.00</b>	<b>10.56</b>	<b>372,863,024.00</b>	<b>66,899,211.00</b>	<b>17.94</b>
Belanja Jasa Kantor	4,069,044,000.00	366,617,398.00	9.01	350,100,586.00	16,516,812.00	4.72
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1,056,000.00	990,437.00	93.79	474,438.00	515,999.00	108.76
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	93,551,000.00	72,154,400.00	77.13	22,288,000.00	49,866,400.00	223.74
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>90,947,000.00</b>	<b>90,384,500.00</b>	<b>99.38</b>	<b>70,826,000.00</b>	<b>19,558,500.00</b>	<b>27.61</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79,741,000.00	79,178,500.00	99.29	52,647,000.00	26,531,500.00	50.40
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,206,000.00	11,206,000.00	100.00	17,764,000.00	(6,558,000.00)	(36.92)
Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	415,000.00	(415,000.00)	(100.00)
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>488,231,000.00</b>	<b>466,873,590.00</b>	<b>95.63</b>	<b>554,840,697.00</b>	<b>(87,967,107.00)</b>	<b>(15.85)</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	488,231,000.00	466,873,590.00	95.63	554,840,697.00	(87,967,107.00)	(15.85)
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>20,750,000.00</b>	<b>20,750,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>113,500,000.00</b>	<b>(92,750,000.00)</b>	<b>(81.72)</b>
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20,750,000.00	20,750,000.00	100.00	113,500,000.00	(92,750,000.00)	(81.72)
<b>Jumlah</b>	<b>5,504,296,000.00</b>	<b>1,702,318,305.00</b>	<b>30.93</b>	<b>1,935,224,411.00</b>	<b>(232,906,106.00)</b>	<b>(12.04)</b>

- Realisasi Belanja Barang pada Tahun 2023 pada Tahun 2023 sebesar Rp. 684.547.980,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 138.646.710,00 atau ( 16,84 ) dari realisasi belanja barang tahun 2022 sebesar Rp. 823.194.690,00.
- Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 sebesar Rp. 439.762.235,00, naik sebesar Rp. 66.899.211,00 atau 17,94% dari realisasi belanja jasa Tahun 2022 sebesar Rp. 372.863.024,00.
- Realisasi Belanja Pemeliharaan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 90.384.500,00, juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.558.500,00 atau 27,61% dari realisasi belanja pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp. 70.826.000,00. Adapun kenaikan diperoleh dari kenaikan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin di mana pada tahun 2023 realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 79.178.500,00, naik sebesar Rp. 531.500.000,00 atau 50,40% dari realisasi belanja pemeliharaan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp. 52.647.000,00. Sedangkan untuk belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 11.206.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 6,558,000.00 atau (36.92) dari realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp. 17,764,000.00. Penurunan juga terjadi pada realisasi belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi di mana pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak



mengalokasikan anggaran pada rekening tersebut. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 415.000,00. Itu mengalami penurunan sebesar Rp 415.000,00 atau ( 100%).

- Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 sebesar Rp. 466.873.590,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 87.967.107,00 atau ( 15,85%) dari realisasi perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp. 554.840.697,00.
- Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp. 20,750,000.00, turun sebesar Rp. 92,750,000.00 atau ( 81,72%) dari realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 sebesar Rp. 113.500.000,00.

Realisasi belanja terbesar untuk kelompok Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023 adalah Belanja Barang Pakai Habis dengan jumlah realisasi sebesar Rp.684.547.980,00 atau 40,21% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023.

**c. Belanja Hibah \_\_\_\_\_ Rp 0,00**

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp.0,00 atau turun 100,00% dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp.220.000.000,00 karena pada tahun 2023 tidak ada anggaran untuk belanja Hibah. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Belanja Hibah**

Uraian	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} \times 100$	5	$6 = (3-5)$	$7 = \frac{6}{5} \times 100$
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0.00	0.00		220,000,000.00	(220,000,000.00)	(100.00)
Jumlah	0.00	0.00		220,000,000.00	(220,000,000.00)	(100.00)

**2. Belanja Modal \_\_\_\_\_ Rp. 0,00**

Realisasi Belanja Modal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 atau (100,00%) dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp.10.000.000,00 karena pada









Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Jika dibandingkan saldo persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor tahun 2023 naik sebesar Rp. 1.932.700,00 atau naik 138,14% dari saldo persediaan Alat/Bahan Untuk Kantor tahun 2022 sebesar Rp. 5.067.500,00, sedangkan saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada tahun 2023 naik sebesar Rp. 99.843.440,00 dari saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat tahun 2022 sebesar Rp. 0,00.

**Barang Pakai Habis**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4=3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	7,000,200.00	5,067,500.00	1,932,700.00	38.14
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	99,843,440.00	0.00	99,843,440.00	
<b>Jumlah</b>	<b>106,843,640.00</b>	<b>5,067,500.00</b>	<b>101,776,140.00</b>	<b>2,008.41</b>

Sedangkan Untuk Persediaan Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Saldo per 31 Desember 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4=3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3		
Alat Tulis Kantor	1,249,900.00	1,445,000.00	(195,100.00)	(13.50)
Kertas dan Cover	1,997,900.00	1,252,000.00	745,900.00	59.58
Benda Pos	702,000.00	696,000.00	6,000.00	0.86
Bahan Komputer	2,659,400.00	1,500,000.00	1,159,400.00	77.29
Perabot Kantor	0.00	174,500.00	(174,500.00)	(100.00)
Alat Listrik	391,000.00	0.00	391,000.00	
<b>Jumlah</b>	<b>7,000,200.00</b>	<b>5,067,500.00</b>	<b>1,932,700.00</b>	<b>38.14</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kenaikan terbesar pada persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor terdapat pada saldo persediaan Bahan Komputer naik sebesar Rp. 1.159.400,00 atau naik 77,29 % dari saldo persediaan Bahan Komputer per 31 Desember 2022 yaitu Rp.1.500.000,00, saldo persediaan Kertas dan Cover naik sebesar Rp.745.900,00 atau naik 59,58% dari saldo persediaan Kertas dan Cover tahun 2022 sebesar Rp. 1.252.000,00, saldo persediaan Benda Pos naik sebesar Rp. 6.000,00 atau naik 0,86% dari saldo persediaan Benda Pos tahun 2022 sebesar Rp 696.000,00, dan untuk saldo persediaan Alat Listrik naik sebesar Rp.391.000,00 sedangkan pada tahun 2022 sado persediaan Alat Listrik sebesar Rp.0,00.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Dari tabel diatas juga dapat dijelaskan bahwa penurunan saldo persediaan per 31 Desember 2023 Dins Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pada saldo persediaan Alat Tulis Kantor yang mengalami penurunan sebesar Rp.195.100,00 atau (13,50%) dari saldo persediaan Alat Tulis Kantor tahun 2022 sebesar Rp.1.445.000,00 dan juga pada saldo persediaan Perabot Kantor turun Rp. 174.000,00 atau (100%) dari saldo persediaan Perabot Kantor tahun 2022 sebesar Rp 174.000,00.

Selain saldo persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang mengalami kenaikan per 31 Desember 2023 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat pula kenaikan pada persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4=3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4=3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	99,843,440.00	0.00	99,843,440.00	
<b>Jumlah</b>	<b>99,843,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,843,440.00</b>	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan saldo persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp. 99.843.440,00 sedangkan pada tahun 2022 tidak ada atau saldo persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp. 0,00.

**2. Aset Tetap \_\_\_\_\_ Rp.1.773.589.131,50**

Nilai Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.773.589.131,50 atau turun sebesar Rp.86.215.910,85 atau (4,64%) dari nilai Aset Tetap 2022 sebesar Rp. 1.859.805.042,35

**ASET TETAP**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4=3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4=3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Tanah	622,857,000.00	622,857,000.00	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	1,488,289,622.00	1,488,289,622.00	0.00	0.00
Gedung dan Bangunan	1,692,065,204.00	1,680,859,204.00	11,206,000.00	0.67
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>3,803,211,826.00</b>	<b>3,792,005,826.00</b>	<b>11,206,000.00</b>	<b>0.30</b>
Akumulasi Penyusutan	(2,029,622,694.50)	(1,932,200,783.65)	(97,421,910.85)	5.04
<b>Nilai Buku</b>	<b>1,773,589,131.50</b>	<b>1,859,805,042.35</b>	<b>(86,215,910.85)</b>	<b>(4.64)</b>



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Penurunan aset tetap tahun 2023 senilai (Rp. 86.215.910,85) yang terdiri dari mutasi aset masuk naik sebesar Rp.11.206.000,00 atau 0,30% dan akumulasi penyusutan turun sebesar (Rp.97.421.910,85).

Secara rinci, penjelasan atas mutasi tambah dan kurang aset tetap tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Tanah \_\_\_\_\_ Rp. 622.857.000,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 622.857.000,00 atau tidak mengalami perubahan dari posisi saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.622.857.000,00, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tanah**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4=3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3		
Tanah Persil	622,857,000.00	622,857,000.00	0.00	0.00
Jumlah	622,857,000.00	622,857,000.00	0.00	0.00

**b. Peralatan dan Mesin \_\_\_\_\_ Rp 1.488.289.622,00**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 1.488.289.622,00 atau tidak ada perubahan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.488.289.622,00, hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah :

**Peralatan dan Mesin**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4=3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3		
Alat Angkutan	1,076,465,522.00	1,076,465,522.00	0.00	0.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	203,757,300.00	203,757,300.00	0.00	0.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	32,954,000.00	32,954,000.00	0.00	0.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Komputer	174,112,800.00	174,112,800.00	0.00	0.00
Jumlah	1,488,289,622.00	1,488,289,622.00	0.00	0.00

**c. Gedung dan Bangunan \_\_\_\_\_ Rp. 1.692.065.204,00**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 1.692.065.204,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.206.000,00 atau naik sebesar 0,67% dari posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.680.859.204,00. hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Gedung dan Bangunan**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3		



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Bangunan Gedung	1,692,065,204.00	1,680,859,204.00	11,206,000.00	0.67
<b>Jumlah</b>	<b>1,692,065,204.00</b>	<b>1,680,859,204.00</b>	<b>11,206,000.00</b>	<b>0.67</b>

Perubahan penambahan nilai sebesar Rp. 11.206.000,00 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan**

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Saldo Awal Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2023	1,680,859,204.00
<b>Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan:</b>	
Aset tetap dari belanja barang dan jasa	11,206,000.00
<b>Jumlah Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan</b>	<b>11,206,000.00</b>
<b>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023</b>	<b>1,692,065,204.00</b>

Penambahan tersebut dikarenakan mutasi tambah Aset Tetap dari belanja Barang dan Jasa / pemeliharaan Gedung pada Tahun 2023 sebesar Rp. 11.206.000,00.

**d. Akumulasi Penyusutan \_\_\_\_\_ Rp. (2.029.622.694,50)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (2.029.622.694,50) bertambah sebesar (Rp.97.421.910,85) atau naik 5,04% dari posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (1.932.200.783,65) sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Akumulasi Penyusutan**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
1	2	3	4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,454,507,422.00)	(1,391,241,603.25)	(63,265,818.75)	4.55
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(575,115,272.50)	(540,959,180.40)	(34,156,092.10)	6.31
<b>Jumlah</b>	<b>(2,029,622,694.50)</b>	<b>(1,932,200,783.65)</b>	<b>(97,421,910.85)</b>	<b>5.04</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.2.029.622.694,50) naik sebesar Rp.(97.421.910,85) atau 5,04% dari saldo akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp. (1,932,200,783.65).

Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp 63.265.818,75) atau 4,55% dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar (Rp. 1,391,241,603.25) dan Kenaikan pada Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp. 34.156.092,10) atau 6,31% dari Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 540,959,180.40).



e. **Kewajiban** \_\_\_\_\_ **Rp. 77.508.502,00**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 sebesar Rp.77.508.502,00, turun sebesar Rp.22.343.211,00 atau (22,38%) dari posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 99.851.731,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

**KEWAJIBAN**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Kewajiban Jangka Pendek	77,508,502.00	99,851,713.00	(22,343,211.00)	(22.38)
Utang Belanja	77,508,502.00	99,851,713.00	(22,343,211.00)	(22.38)
Jumlah	77,508,502.00	99,851,713.00	(22,343,211.00)	(22.38)

Adapun rincian dari penurunan Kewajiban Jangka Pendek yaitu Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 73.941.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 21.978.396,00 atau (22,91%) dibanding dengan Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 95.920.296,00 Sedangkan untuk Sado Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.566.602,00 turun sebesar Rp. 364.815,00 atau (9,25%) dibanding saldo Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp. 3.566.602,00, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Utang Belanja**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Utang Belanja Pegawai	73,941,900.00	95,920,296.00	(21,978,396.00)	(22.91)
Utang Belanja Barang dan Jasa	3,566,602.00	3,931,417.00	(364,815.00)	(9.28)
Jumlah	77,508,502.00	99,851,713.00	(22,343,211.00)	(22.38)

1. Utang Belanja Pegawai terdiri dari :

Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 73.941.900,00. Turun sebesar Rp. 21.978.396,00 atau ( 22,91%) dari saldo utang belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 95.920.296,00. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Utang Belanja Pegawai**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0.00	5,069,296.00	(5,069,296.00)	(100.00)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73,941,900.00	90,851,000.00	(16,909,100.00)	(18.61)
Jumlah	73,941,900.00	95,920,296.00	(21,978,396.00)	(22.91)



a. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan Rp. 5.069.296,00 atau (100,00% ) dari utang belanja Gaji dn Tunjangan ASN per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp. 5.069.296,00.

b. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 73.941.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 16.909.100,00 atau (18,61%) dari Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 90.851.000,00.

2. Utang belanja Barang dan Jasa

Pada tabel di bawah ini dapat dijelaskan bahwa saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.566.602,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 364.815,00 atau (9,28%) dari saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.931.417,00 .

**Utang Belanja Barang dan Jasa**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
1	2	3	4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
Utang Belanja Jasa	3,566,602.00	3,931,417.00	(364,815.00)	(9.28)
<b>Jumlah</b>	<b>3,566,602.00</b>	<b>3,931,417.00</b>	<b>(364,815.00)</b>	<b>(9.28)</b>

f. **Ekuitas \_\_\_\_\_ Rp. 1.802.924.269,50**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.802.924.269,50 mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.903.440,15 atau turun sebesar 2,15% dari posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.765.020.829,35 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah :

**EKUITAS**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
1	2	3	4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
Ekuitas	1,802,924,269.50	1,765,020,829.35	37,903,440.15	2.15
<b>Jumlah</b>	<b>1,802,924,269.50</b>	<b>1,765,020,829.35</b>	<b>37,903,440.15</b>	<b>2.15</b>





### **3.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

#### **3.3.1 PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrual. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional yaitu Beban-LO.

**Beban-LO** adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga merupakan SKPD yang tidak mengelola pendapatan. Realisasi Beban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar Rp.4.373.897.016,85.

Realisasi Beban tersebut terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp.2.687.507.756,00, Beban Persediaan-LO sebesar Rp. 530.456.840,00, Beban Jasa-LO sebesar Rp. 460.143.420,00, Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp.79.178.500,00, Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp. 466.873.590,00, Beban Hibah-LO sebesar Rp. 52.315.000,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp. 97.421.910,85.

Dari realisasi Beban tersebut, maka pada tahun 2023, terdapat defisit sebesar Rp. 4.373.897.016,85. Defisit dari Kegiatan Non Operasional -LO sebesar Rp. 0,00.

Dari realisasi Pendapatan –LO, Beban – LO, dan Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tersebut, maka pada tahun 2022 terdapat defisit-LO sebesar Rp. 5.293.207.499,67.

Adapun Posisi Laporan Operasional Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada table di bawah ini :



**LO**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
BEBAN	4,373,897,016.85	5,293,207,499.67	(919,310,482.82)	(17.37)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(4,373,897,016.85)</b>	<b>(5,293,207,499.67)</b>	<b>919,310,482.82</b>	<b>(17.37)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(4,373,897,016.85)</b>	<b>(5,293,207,499.67)</b>	<b>919,310,482.82</b>	<b>(17.37)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>(4,373,897,016.85)</b>	<b>(5,293,207,499.67)</b>	<b>919,310,482.82</b>	<b>(17.37)</b>

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Operasional adalah sebagaimana berikut:

**3.3.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**A. BEBAN \_\_\_\_\_ Rp. 4.373.897.016,85**

Saldo Beban per 31 Desember 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 4.373.897.016,85 yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp.2.687.507.756,00, Beban Persediaan-LO sebesar Rp. 530.456.840,00, Beban Jasa-LO sebesar Rp. 460.143.420,00, Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp. 79.178.500,00, Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp. 466.873.590,00, Beban Hibah-LO sebesar Rp. 52.315.000,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp. 97.421.910,85.

Saldo Beban tahun 2023 mengalami penurunan sebesar ( Rp 919.310.482,82) atau (17,37%) dari posisi per 31 Desember 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

**BEBAN versi SAP**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Beban Pegawai	2,687,507,756.00	3,009,992,928.00	(322,485,172.00)	(10.71)
Beban Persediaan	530,456,840.00	592,473,150.00	(62,016,310.00)	(10.47)
Beban Jasa		490,294,441.00	(30,151,021.00)	(6.15)
Beban Pemeliharaan	79,178,500.00	53,062,000.00	26,116,500.00	49.22
Beban Perjalanan Dinas	466,873,590.00	554,840,697.00	(87,967,107.00)	(15.85)
Beban Hibah	52,315,000.00	456,037,990.00	(403,722,990.00)	(88.53)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	97,421,910.85	136,506,293.67	(39,084,382.82)	(28.63)
<b>Jumlah</b>	<b>4,373,897,016.85</b>	<b>5,293,207,499.67</b>	<b>(919,310,482.82)</b>	<b>(17.37)</b>



**1. Beban Pegawai-LO \_\_\_\_\_ Rp. 2.687.507.756,00**

Beban Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Beban Pegawai-LO tahun 2023 sebesar Rp. 2.687.507.756,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 322.485.172,00 atau (10,71%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp.3.009.992.928.00, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,579,531,858.00	1,749,404,802.00	(169,872,944.00)	(9.71)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1,074,875,898.00	1,188,913,126.00	(114,037,228.00)	(9.59)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33,100,000.00	71,675,000.00	(38,575,000.00)	(53.82)
<b>Jumlah</b>	<b>2,687,507,756.00</b>	<b>3,009,992,928.00</b>	<b>(322,485,172.00)</b>	<b>(10.71)</b>

Beban Pegawai-LO tahun 2023 sebesar Rp. 2.687.507.756,00, sedangkan Realisasi Belanja Pegawai-LRA tahun 2023 sebesar Rp. 2.709.486.142,00 terdapat selisih kurang sebesar (Rp. 21.978.396,00,) sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai			
Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.579.531.858,00	1.584.601.154,00	(5.069.296,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.074.875.898,00	1.091.784.998,00	(16.909.100,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.687.507.756,00</b>	<b>2.709.486.152,00</b>	<b>(21.978.396,00)</b>

Adapun penjelasan selisih kurang sebesar (Rp.21.978.396,00) dikarenakan terdapat selisih kurang pada Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LRA sebesar (Rp.5.069.293,00) selain itu terdapat selisih kurang Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan-LRA sebesar (Rp. 16.909.100,00). Dengan rincian adanya Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 yang dibayarkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 5.069.293,00, utang belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2022 yang dibayarkan Tahun 2023 sebesar Rp. 90.851.000,00, dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2023 sebesar Rp. 73.941.900,00





Adapaun penjelasan selisih kurang sebesar (Rp. 154.091.140,00) dikarenakan terdapat selisih kurang pada Beban Kertas dan Cover dan Belanja Kertas dan Cover sebesar (Rp.745.900,00), selisih kurang pada Beban Benda Pos dan Belanja Benda Pos sebesar (Rp.6.000,00), selisih kurang pada Beban Bahan Komputer dan Belanja Bahan Komputer sebesar (Rp.1.159.400), selisih kurang pada Beban Alat Listrik dan Belanja Alat Listrik sebesar (Rp.391.000,00) dan selisih kurang pada Beban Barang untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar (Rp. 152.158.440), selain itu terdapat selisih lebih pada Beban Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 195.100,00, dan selisih lebih pada Beban Perabot Kantor dan Belanja Perabot Kantor sebesar Rp.174.500,00.

**3. Beban Jasa \_\_\_\_\_ Rp. 460.143.420,00**

Beban Jasa-LO Tahun 2023 sebesar Rp. 460.143.420,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 30.151.021,00 atau (6,15%) dari Beban Jasa LO Tahun 2022 sebesar Rp. 490.294.441.000,00 sebagaimana tabel berikut :

**Beban Jasa**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3		
Beban Jasa Kantor	366,248,583.00	354,032,003.00	12,216,580.00	3.45
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	990,437.00	474,438.00	515,999.00	108.76
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	72,154,400.00	22,288,000.00	49,866,400.00	223.74
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20,750,000.00	113,500,000.00	(92,750,000.00)	(81.72)
<b>Jumlah</b>	<b>460,143,420.00</b>	<b>490,294,441.00</b>	<b>(30,151,021.00)</b>	<b>(6.15)</b>

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp. 460.143.420,00, sedangkan Belanja Jasa tahun 2023 sebesar Rp. 460.512.235,00 terdapat selisih kurang sebesar (Rp.368.815,00). sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Perbedaan Beban Jasa dan Belanja Jasa			
Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Jasa Kantor	366.248.583,00	366.617.398,00	(368.815,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	990.437,00	990.437,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	72.154.400,00	72.154.400,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>460.143.420,00</b>	<b>460.512.235,00</b>	<b>(368.815,00)</b>



Adapun penjelasan selisih kurang sebesar (Rp.368.815,00) dikarenakan terdapat selisih kurang pada Beban Jasa Kantor dan Belanja Jasa Kantor sebesar (Rp.368.815,00).

**4. Beban Pemeliharaan** \_\_\_\_\_ **Rp. 79.178.500,00**

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp. 79.178.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.116.500,00 atau naik sebesar 49,22% dari tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

**Beban Pemeliharaan**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79,178,500.00	52,647,000.00	26,531,500.00	50.40
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	415,000.00	(415,000.00)	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>79,178,500.00</b>	<b>53,062,000.00</b>	<b>26,116,500.00</b>	<b>49.22</b>

Beban Pemeliharaan-LO tahun 2023 sebesar Rp. 79.178.500,00, sedangkan Realisasi Belanja Jasa-LRA tahun 2023 sebesar Rp. 90.384.500,00 terdapat selisih kurang sebesar (Rp.11.206.000,00). sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Perbedaan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan			
Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.178.500,00	79.178.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	11.206.000,00	(11.206.000,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>79.178.500,00</b>	<b>90.384.500,00</b>	<b>(11.206.000,00)</b>

Adapun penjelasan selisih kurang sebesar (Rp.11.206.000,00) dikarenakan terdapat selisih kurang pada Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LO dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar (Rp.11.206.000,00), dikarenakan ada Belanja Pemeliharaan yang menghasilkan Aset Tetap.

**5. Beban Perjalanan Dinas** \_\_\_\_\_ **Rp. 466.873.590,00**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp.466.873.590,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 87.967.107,00 atau (15,85%) dari Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp. 554.840.697,00 sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	307,048,590.00	309,765,697.00	(2,717,107.00)	(0.88)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	159,825,000.00	245,075,000.00	(85,250,000.00)	(34.79)
<b>Jumlah</b>	<b>466,873,590.00</b>	<b>554,840,697.00</b>	<b>(87,967,107.00)</b>	<b>(15.85)</b>

Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2023 sebesar Rp. 466.873.590,00, sedangkan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA tahun 2023 sebesar Rp. 466.873.590,00 tidak ada selisih sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Perbedaan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	307.048.590,00	307.048.590,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	159.825.000,00	159.825.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>466.873.590,00</b>	<b>466.873.590,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Beban Hibah \_\_\_\_\_ Rp. 52.315.000,00**

Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp.52.315.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 403.722.990,00) atau (88,53%) dari tahun 2022 sebesar Rp. 456,037,990.00 , sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Beban Hibah**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52,315,000.00	456,037,990.00	(403,722,990.00)	(88.53)
<b>Jumlah</b>	<b>52,315,000.00</b>	<b>456,037,990.00</b>	<b>(403,722,990.00)</b>	<b>(88.53)</b>

Beban Hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp. 52.315.000,00, sedangkan Realisasi Belanja Hibah-LRA tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 ada selisih naik sebesar Rp.52.315.000,00, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Perbedaan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	52.315.000,00	0,00	52.315.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.315.000,00</b>

**7. Beban Penyusutan dan Amortisasi \_\_\_\_\_ Rp. 97.421.910,85**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp.97.421.910,85 mengalami penurunan sebesar Rp. 39.084.382,82 atau (28,63%) dari Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 136.506.293,67, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	63,265,818.75	102,824,518.75	(39,558,700.00)	(38.47)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34,156,092.10	33,681,774.92	474,317.18	1.41
<b>Jumlah</b>	<b>97,421,910.85</b>	<b>136,506,293.67</b>	<b>(39,084,382.82)</b>	<b>(28.63)</b>

Pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp.63.265.818,75 mengalami penurunan sebesar Rp. 39.558.700,00 atau (38,47%) dari tahun 2022 sebesar Rp. 102.824.518,75, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	39,281,718.75	64,404,218.75	(25,122,500.00)	(39.01)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,729,300.00	21,075,300.00	(5,346,000.00)	(25.37)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	379,800.00	2,079,800.00	(1,700,000.00)	(81.74)
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Komputer	7,675,000.00	15,065,200.00	(7,390,200.00)	(49.05)
<b>Jumlah</b>	<b>63,265,818.75</b>	<b>102,824,518.75</b>	<b>(39,558,700.00)</b>	<b>(38.47)</b>

Sedangkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp.34.156.092,10 mengalami kenaikan sebesar Rp. 474.317,18 atau turun 1,41% dari tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 ( Rp )	5=4/3*100 (%)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	34,156,092.10	33,681,774.92	474,317.18	1.41
<b>Jumlah</b>	<b>34,156,092.10</b>	<b>33,681,774.92</b>	<b>474,317.18</b>	<b>1.41</b>

**3.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Posisi Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.802.924.269,50. Naik sebesar Rp. 37.903.440,15 atau 2,15% dari Posisi Ekuitas Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.765.020.829,35.





Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>1,765,020,829.35</b>	<b>1,922,244,137.02</b>	<b>(157,223,307.67)</b>	<b>(8.18)</b>
Surplus/Defisit LO	(4,373,897,016.85)	(5,293,207,499.67)	919,310,482.82	(17.37)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(4,000.00)	(34,875.00)	30,875.00	(88.53)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	4,411,804,457.00	5,136,019,067.00	(724,214,610.00)	(14.10)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>1,802,924,269.50</b>	<b>1,765,020,829.35</b>	<b>37,903,440.15</b>	<b>2.15</b>

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

**A. Ekuitas Awal \_\_\_\_\_ Rp. 1.765.020.829,35**

Ekuitas awal tahun 2023 berasal dari saldo ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp. 1.765.020.829,35. Ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp. 1.765.020.829,35 mengalami penurunan sebesar Rp. 157.233.306,67 atau ( 8,18%) dari ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp. 1.922.244.137,02.

**EKUITAS AWAL**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Ekuitas Awal	1,765,020,829.35	1,922,244,137.02	(157,223,307.67)	(8.18)
<b>Jumlah</b>	<b>1,765,020,829.35</b>	<b>1,922,244,137.02</b>	<b>(157,223,307.67)</b>	<b>(8.18)</b>

**B. Surplus / Defisit-LO \_\_\_\_\_ Rp. (4.373.897.016,85)**

Surplus/defisit – LO tahun 2023 berasal dari Jumlah saldo Beban tahun 2023 sebesar (Rp. 4.373.897.016,85). Defisit turun sebesar Rp. 919.310.482.82 atau (17,37%) dari Posisi tahun 2022 sebesar (Rp. 5.293.207.499,67

**C. Koreksi Ekuitas \_\_\_\_\_ (Rp. 4.000,00)**

Koreksi Ekuitas pada tahun 2023 sebesar (Rp.4.000,00) atau mengalami kenaikan sebesar Rp.30.875,00 dari saldo Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022 yang sebesar (Rp. 34.875,00) dikarenakan adanya Koreksi Ekuitas Karena Kesalahan Pencatatan Utang.

**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Koreksi Ekuitas Karena Kesalahan Pencatatan Utang	(4,000.00)	(34,875.00)	30,875.00	(88.53)
<b>Jumlah</b>	<b>(4,000.00)</b>	<b>(34,875.00)</b>	<b>30,875.00</b>	<b>(88.53)</b>



**D. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan \_\_\_\_\_ Rp.4.411.804.457,00**

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.441.804.457,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 724.214.610,00 atau (14,10%) dari saldo Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp. 5.136.019.067,00 merupakan kewajiban SKPD yang akan dikonsolidasikan yang merupakan R/K PPKD. Lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

**KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN**

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	31-Des-2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
1	2	3	4 = 3-2 (Rp)	5=4/3*100 (%)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	4,411,804,457.00	5,136,019,067.00	(724,214,610.00)	(14.10)
Jumlah	4,411,804,457.00	5,136,019,067.00	(724,214,610.00)	(14.10)

**E. Ekuitas Akhir \_\_\_\_\_ Rp. 1.802.924.269,50**

Ekuitas akhir tahun 2023 merupakan hasil dari Ekuitas awal sebesar Rp.1.765.020.829,35 Defisit-LO sebesar (Rp. 4.373.897.016,85) , Koreksi Ekuitas sebesar (Rp. 4.000,00) dan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp 4.411.804.457,00.



**BAB IV**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI**  
**NON KEUANGAN SKPD**

**4.4 Informasi-informasi Keuangan SKPD Non APBD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2023 memfasilitasi penyaluran dana bantuan kepada Pemerintah Desa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Adapun fasilitasi yang dilakukan yaitu :

A. Bantuan untuk Pemerintah Desa yang bersumber dari APBN

Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yaitu Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga. Pada Tahun 2023 Dinpermasdes memfasilitasi Dana Desa sebesar Rp.254.557.923.000,- yang dialokasikan kepada 224 desa di Kabupaten Purbalingga, dengan realisasi penyaluran Rp.254.557.923.000,- atau sebesar 100,00 %. dengan pembagian alokasi per desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023.

B. Bantuan untuk Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah

Alokasi bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1). Bantuan operasional bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di 224 Desa Se-Kabupaten Purbalingga masing-masing Rp.5.000.000,- total sejumlah Rp.1.120.000.000,- dengan realisasi 100% .
- 2). Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan sejumlah 280 titik kegiatan yang besarnya bervariasi antara Rp.50.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- Total bantuan sejumlah Rp. 36.805.000.000,00 dengan realisasi Rp. 36.805.000.000,00 atau 100%.

C. Bantuan untuk Kegiatan TMMD yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga memfasilitasi bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 untuk Kegiatan TMMD Sengkuyung I, III dan III di 3 (tiga) desa sejumlah Rp758.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

APBD PROVINSI (Rp.)	APBD KAB (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	LOKASI DAN HASIL KEGIATAN
Rp. 258.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 358.000.000,00	Sengkuyung I Desa Karangbawang Kecamatan Rembang 1. Pembangunan Jalan Baru dengan Ukuran Panjang 909 Meter x Lebar 7 Meter 2. Pembangunan Jalan Makadam Panjang 176 meter x Lebar 5 meter 3. Pembangunan Gorong – gorong Box Culvert Panjang 1 Meter x Lebar 1 Meter, Tinggi 1,2 Meter x 7 buah
Rp. 250.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Sengkuyung II Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara 1. Pembukaan Jalan Baru Ukuran Panjang 720 meter x Lebar 7 meter 2. Pembangunan Jalan Makadam Ukuran Panjang 595 meter x Lebar 5 meter 3.
Rp. 250.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Sengkuyung III Desa Cendana Kecamatan Kutasari 1. Pembukaan Jalan Baru Panjang 2338 Meter x Lebar 5 Meter 2. Pembangunan Jalan Makadam Panjang 250 Meter x Lebar 5 Meter 3. Pembangunan Gorong – gorong Box Culvert Ukuran Panjang 1 Meter x Tinggi 1,2 Meter x Lebar 5 meter x 3 Buah 4. Rehabilitasi RTLH sebanyak 2 Unit



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2023.

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

- A. Realisasi Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457,00 atau 53,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 8.323.336.000,00. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah Rp. 1.880.432.771,50 atau naik Rp.15.560.229,15 atau 0,83% dari posisi Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.864.872.542,35.
- B. Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 adalah Rp. 1.802.924.269,50 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.903.440,15 atau 2,15% dibanding posisi Ekuitas Dana Tahun 2022 yang sebesar Rp.1.765.020.829,35.

Keberhasilan pencapaian target kinerja dan sasaran yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 juga tidak lepas dari hasil kerja keras dan kebersamaan pihak-pihak yang terkait dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Belanja Daerah, Aset serta Kewajiban. Dengan Laporan Keuangan ini mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan kekayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan APBD pada Tahun Anggaran yang akan datang.

Selanjutnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara lengkap selain pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,



Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

---

Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Purbalingga, 31 Desember 2023

KEPALA DINPERMASDES  
KABUPATEN PURBALINGGA

ATO SUSANTO, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001